

**MULO KOETARADJA DAN KONTRIBUSINYA
BAGI PERGERAKAN NASIONAL DI ACEH ABAD XX**

***MULO KOETARADJA AND ITS CONTRIBUTION TOWARDS
NATIONAL MOVEMENT IN ACEH IN XX CENTURY***

Sudirman

Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Aceh
Jalan Tuanku Hasyim Banta Muda No. 17 Banda Aceh
Email: sudiraceh71@gmail.com

DOI: 10.36424/jpsb.v8i2.330

*Naskah Diterima: 06 April 2022 Naskah Direvisi: 16 Agustus 2022
Naskah disetujui: 31 Agustus 2022*

Abstrak

Pemerintah Hindia Belanda mengalami kewalahan dalam menguasai Aceh dengan cara kekerasan. Oleh karena itu, mereka mengubah strategi dalam menguasai Aceh, di antaranya melalui sistem pendidikan. Untuk itu, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan berbagai lembaga pendidikan di Aceh, salah satunya adalah MULO Koetaradja dengan harapan dapat melemahkan perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menjelaskan sistem pendidikan MULO Koetaradja (*Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs*) dan kontribusinya bagi pergerakan nasional di Aceh. Dalam penelitian ini digunakan metode sejarah kritis supaya mendapatkan data yang akurat dan pemahaman yang menyeluruh tentang MULO Koetaradja dan kontribusinya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca sejumlah arsip dan buku di perpustakaan, kemudian mencatat bagian-bagian yang sesuai dengan pokok bahasan. Selanjutnya, melakukan verifikasi dan interpretasi terhadap data serta menyimpulkannya. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pendidikan MULO Koetaradja dimaksudkan untuk mendidik orang-orang yang dapat bekerja menjadi pegawai pada administrasi Pemerintah Hindia Belanda. MULO Koetaradja menerapkan sistem diskriminasi pendidikan berdasarkan status sosial. Kurikulum yang diterapkan lebih banyak mata pelajaran bahasa Belanda dan tenaga pengajarnya berasal dari orang Belanda. Orang Aceh lulusan sekolah tersebut menjadi pelopor munculnya tatanan baru mengenai sistem pendidikan, tradisi yang tidak sesuai, serta keinginan membangun organisasi sosial-politik guna melakukan berbagai perbaikan dalam kehidupan masyarakat. Berdasar pada apa yang mereka lihat dan rasakan selama menempuh pendidikan, muncul kesadaran untuk berjuang secara diplomasi melalui organisasi pergerakan.

Kata kunci: Sistem Pendidikan MULO, Organisasi Politik, Organisasi Keagamaan

Abstract

The Dutch East Indies government was overwhelmed in controlling Aceh by force. A strategy change was needed, one of which was through the education system. Therefore, the Dutch East Indies government established various educational institutions in Aceh, such as MULO Koetaradja, to weaken the Acehnese people's struggle against the Dutch. This study is conducted to explain the education system of MULO Koetaradja (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) and its contribution to the national movement in Aceh. This study applies the critical historical method to obtain accurate data and a comprehensive understanding of MULO Koetaradja and its contribution. The data is collected from archives and books read in libraries and taking notes on the parts that are by the subject matter, verifying and interpreting the data, and making a conclusion. This study concludes that MULO Koetaradja education was formerly intended to educate people who could later work as employees in the administration of the Dutch East Indies Government. It implemented a system of educational discrimination based on social status. The curriculum applied was mostly Dutch and the teaching staff was Dutch. Acehnese graduates became the pioneers of the emerging new order regarding the education system, inconvenient traditions, and the desire to build socio-political organizations to make various improvements in people's lives. Based on what they saw and felt during their education, awareness among graduates to fight diplomatically through movement organizations emerged.

Keywords: MULO Education System, Political Organization, Religious Organization.

PENDAHULUAN

Pemerintah Hindia Belanda melakukan berbagai strategi dalam melumpuhkan perlawanan rakyat Aceh. Pada mulanya strategi yang ditempuh adalah dengan cara kekerasan, tetapi dianggap tidak berhasil, karena menanamkan rasa dendam yang mendalam pada rakyat Aceh. Rasa dendam tersebut dilampiaskan dalam bentuk kenekatan, yaitu membunuh orang Belanda kapan saja dan di mana saja yang dijumpainya. Menghadapi situasi itu, pada permulaan abad ke-20, Pemerintah Hindia Belanda mengubah strategi menguasai Aceh, yaitu dengan cara menerapkan politik pasifikasi. Untuk menaklukkan Aceh, Pemerintah Hindia Belanda melakukannya dengan cara yang tidak menyakiti rakyat Aceh. Politik pasifikasi juga merupakan penjabaran dari politik etis Pemerintah Hindia

Belanda yang diterapkan untuk daerah jajahannya (Syaharuddin dan Heri Susanto, 2019: 37).

Salah satu isi kebijakan politik pasifikasi adalah perbaikan bidang pendidikan. Pemerintah Hindia Belanda berusaha meningkatkan kecerdasan rakyat Aceh, terutama bagi putra-putri *uleebalang* (bangsawan) melalui sistem pendidikan Barat. Hal itu dimaksudkan untuk meredam perlawanan rakyat Aceh dan untuk kepentingan pekerja pada birokrasi Pemerintah Hindia Belanda (Rifa'i, 2011: 58-59). Oleh karena itu, mereka sangat berkepentingan dengan pendidikan rakyat, sehingga semenjak tahun 1907 didirikan berbagai sekolah di Aceh, salah satunya adalah MULO Koetaradja.

Dalam pelaksanaannya, MULO Koetaradja menghadapi berbagai kendala, seperti kekurangan tenaga pengajar, karena belum ada orang yang mampu mengajar pada sekolah tersebut. Demikian pula bahasa yang digunakan, pada umumnya siswa tidak dapat berbahasa Melayu dan sebaliknya, guru tidak dapat berbahasa Aceh. Biaya pendidikan yang masih tinggi, sehingga tidak semua orang mampu bersekolah di lembaga tersebut. Namun di sisi lain, lulusan sekolah tersebut memunculkan kaum intelektual Aceh yang kemudian memelopori lahirnya berbagai organisasi pergerakan guna memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dan menentang kolonialisme. Akibatnya, Pemerintah Hindia Belanda mengubah kebijakannya tentang pendidikan bagi masyarakat Aceh, di antaranya membatasi pendirian sekolah.

Dari permasalahan di atas dapat dirumuskan, yaitu: pertama, bagaimana sistem pendidikan MULO Koetaradja di Aceh? Kedua, bagaimana kontribusi MULO Koetaradja bagi pergerakan nasional di Aceh? Untuk itu, penelitian ini bertujuan, pertama, mendeskripsikan sistem pendidikan MULO Koetaradja di Aceh. Kedua, menjelaskan kontribusi MULO Koetaradja bagi pergerakan nasional di Aceh. Penelitian ini dapat bermanfaat, baik secara teoretis maupun praktis. Manfaat secara teoretis dapat memperkaya kajian tentang sejarah pendidikan di Aceh dan dapat menjadi sumber dan bahan pembahasan bagi penelitian yang sama. Manfaat secara praktis dapat menjadi bahan masukan kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan berkaitan dengan pembangunan

pendidikan. Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan masyarakat untuk menambah wawasannya tentang khazanah sejarah dan budaya bangsanya, sehingga dapat meningkatkan kesadaran berbangsa.

METODE PENELITIAN

Selama ini ada yang beranggapan bahwa pendidikan dan pengajaran yang diberikan oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada masyarakat pribumi adalah untuk memenuhi keperluan pegawai pada birokrasinya (Syahrudin dan Heri Susanto, 2019: 36). Namun, lain halnya yang terjadi pada masyarakat Aceh, karena Pemerintah Hindia Belanda menghadapi dua pandangan terhadap masyarakat Aceh, yaitu bagaimana mencerdaskan masyarakat dan bagaimana meredam perlawanannya terhadap Pemerintah Hindia Belanda.

Banyak informasi yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan di Aceh pada masa Pemerintah Hindia Belanda. Namun, informasi tersebut belum tersusun dengan kronologis dan sistematis. Selain itu, informasi tentang pendidikan tersebut pada umumnya terdapat dalam bahasa Belanda, sehingga masyarakat kesulitan memahami dan membacanya. Di antara sumber yang mengandung informasi tentang perkembangan pendidikan di Aceh adalah seperti dalam sumber-sumber primer yang digunakan dalam penulisan artikel ini.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis yang berdasar pada sumber primer dan sekunder (Muri, 2017: 346). Sumber primer yang digunakan yaitu *Algemeen Verslag van het Onderwijs in Nederlandsch-Indie Over 1928.1930. Koloniaal Verslag*, 1910. *Mail Rapporten*, Kementerian Dalam Negeri Belanda, Den Haag. *Memorie van overgave assistent resident van Groot-Atjeh, C.E. Maier, 17 Juni 1935. Memorie van overgave van A.Ph. van Aken, Aftredend Gouverneur van Atjeh en Onderhoorigheden, Pebruari 1936. Politieke Politoneel Verslag Betreffende het Gewest Atjeh en Onderhoorigheden*. No. 130x/29, sedangkan sumber sekunder yang digunakan seperti buku.

Sumber primer dan sekunder dikumpulkan di sejumlah perpustakaan, seperti Perpustakaan dan Arsip Pemerintah Aceh, Perpustakaan Museum Aceh, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Perpustakaan Balai Pelestarian Nilai Budaya

Provinsi Aceh, dan buku-buku koleksi penulis. Sumber-sumber yang telah terkumpul diverifikasi, baik kritik interen untuk menentukan sumber dapat dipercaya, maupun kritik eksteren guna menguji asli atau tidaknya sumber tersebut (Pranoto, 2010: 36-37). Kritik terhadap sumber dilakukan dengan cara perbandingan dengan sumber yang lain, baik yang serupa, maupun yang tidak serupa. Selanjutnya, sumber-sumber itu diinterpretasi berupa analisis (menguraikan sumber) dan sintesis, yaitu merangkai semua interpretasi terhadap sumber (Kuntowijoyo, 2005: 102--103). Setelah semua sumber diinterpretasi dan disimpulkan maka disusun secara sistematis dan kronologis.

PEMBAHASAN

Lahirnya MULO Koetaradja

Pada tahun 1920, Pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah sekolah di Kutaraja (Banda Aceh) yang diberi nama MULO Koetaradja (*Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs*). Pendirian sekolah ini digagas oleh A.G.H. Van Sluijs ketika dia menjabat sebagai *Civiele Gouverneur* di Aceh pada tahun 1918--1923. Sekolah tersebut pada mulanya dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pendidikan, terutama bagi lulusan *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS) dan *Europeese Lagere School* (ELS). Selain itu, MULO Koetaradja juga dimaksudkan untuk mendidik anak-anak *uleebalang* (bangsawan) dan tokoh masyarakat supaya terampil (Sufi, 2018: 36).

MULO Koetaradja didirikan tidak jauh dari pusat pemerintahan Belanda, yaitu di Koetaradja, tepatnya dekat lapangan Eksplanade Koetaradja (sekarang Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Banda Aceh dan lokasi tersebut menjadi SMPN I Banda Aceh). Pada tahun 1928, Pemerintah Hindia Belanda membuat laporan penyelenggaraan pendidikan di Aceh. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa MULO Koetaradja merupakan satu-satunya pendidikan tertinggi milik Pemerintah Hindia Belanda di Aceh (Memorie, 1936: 141).

Proses pembangunan sekolah ini dilakukan secara bertahap, pada tahap pertama dibangun satu buah gedung yang terdiri atas dua buah ruang. Pada tahap kedua dibangun pula asrama tempat penampungan siswa. Pengelolaan asrama

diserahkan kepada sebuah yayasan yang bernama *Atjeh Internaat*. Waktu belajar di MULO Koetaradja harus diselesaikan dalam waktu tiga tahun (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984: 51). Pada masa pendudukan Jepang, Jepang mengubah MULO Banda Aceh menjadi *Koa-Kunren-Chuto-Gakko* (Sekolah Menengah). Direktur pertama sekolah MULO Koetaradja dijabat oleh Mr. S.M. Amin, setelah itu digantikan oleh Ali Moertolo (Ismail, 2002: 448).

Tanggapan Pemerintah dan Masyarakat

Pemerintah Hindia Belanda sudah menyekolahkan putra-putri bangsawan Aceh ke berbagai daerah, seperti ke Sumatera Barat, Asahan, dan ke pulau Jawa. Namun, menurut A. Ph. Van Aken, Gubernur Sipil Belanda untuk Aceh (1933-1936), menyebutkan bahwa pendidikan MULO diperlukan di Aceh. Hal itu disebabkan mendidik orang pribumi dengan pendidikan Barat dalam lingkungannya sendiri lebih baik supaya tidak tercabut dari akar budayanya (Memorie, 1936: 142). Namun demikian, pendirian sekolah umum di Aceh juga dapat dimaknai sebagai bagian dari usaha Pemerintah Hindia Belanda untuk menjauhkan masyarakat Aceh dari pendidikan yang bernuansa agama. Pemerintah Hindia Belanda menganggap bahwa pendidikan agama termasuk sarana yang memupuk kebencian rakyat Aceh terhadap Belanda (Taniputera, 2017: 268).

Tanggapan masyarakat Aceh terhadap didirikannya sekolah tersebut berbeda-beda. Para pemimpin adat (kelompok *uleebalang*) ada yang menuruti kehendak Belanda, di samping juga ada terus yang melakukan perlawanan. Para pemimpin agama (ulama) ada yang berdiam diri saja, ada pula yang mengikuti *uleebalang* menyekolahkan anaknya pada MULO Koetaradja. Demikian pula dengan kelompok rakyat, ada yang mengikuti ajakan pemerintah dan ada pula yang terus melakukan perlawanan bersama pemimpin-pemimpin mereka yang masih tetap melanjutkan perlawanan (Sufi, 2018: 13).

Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan bahwa murid-murid yang ingin bersekolah di MULO Koetaradja harus mengikuti seleksi yang sangat ketat dari Pemerintah Hindia Belanda. Biaya bersekolah di MULO Koetaradja ditetapkan dengan standard yang tinggi. Orangtua siswa diwajibkan membayar uang sekolah

sebanyak f.0.10 sampai dengan f.0.15 (sekitar 10-15 sen setiap tahun), sementara orangtua siswa tidak semuanya orang yang mampu. Di samping itu, masih ada persyaratan yang sangat memberatkan, yaitu status sosial orang tua murid. Oleh karena itu, murid yang banyak diterima untuk bersekolah di MULO Koetaradja pada mulanya adalah putra-putri bangsawan dan anak pegawai atau ambtenaar yang loyal kepada Pemerintah Hindia Belanda (Sufi, 2018: 37).

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendidikan MULO Koetaradja sangat terbatas, pada mulanya hanya terdapat satu buah gedung yang terdiri atas dua buah ruangan atau lokal. Dua buah ruangan tersebut digunakan oleh siswa kelas satu hingga kelas tiga, sehingga terpaksa dibagi menjadi dua kelompok belajar, yaitu satu lokal disediakan untuk siswa kelas satu dan kelas dua, serta satu lokal lagi diperuntukkan kepada siswa kelas tiga. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh MULO Koetaradja di antaranya disebabkan oleh terlalu banyak sekolah yang didirikan di Aceh pada waktu itu, sehingga tidak hanya fokus pada pendidikan MULO. Selain itu, pengelolaan MULO Koetaradja diserahkan kepada swasta dengan harapan supaya lebih terurus. Namun yang terjadi sebaliknya, pihak swasta tidak mampu mengelola sekolah tersebut secara maksimal, terutama akibat kekurangan biaya (Kreemer, 1923: 169).

Pada tahun 1922, Pemerintah Hindia Belanda mengambil alih pengelolaan MULO Koetaradja. Mereka membangun sebuah yayasan (*stichting*) pada tahun 1922. Yayasan tersebut ditugaskan untuk mendirikan tempat penampungan siswa. Setelah didirikan, yayasan tersebut diberi nama *Atjeh Internaat*. *Atjeh Internaat* lebih banyak menampung putra-putri bangsawan yang berasal dari luar Banda Aceh. Untuk memimpin dan mengurus *Atjeh Internaat* dipercayakan kepada Druyff. Dana operasional *Atjeh Internaat* dikumpulkan dari setiap daerah *uleebalang* (Kreemer, 1923: 262). Pada dasarnya *Atjeh Internaat* diperuntukkan bagi semua etnik yang datang dari luar Banda Aceh (Kreemer, 1923: 169) tetapi, dalam kenyataannya tempat tersebut diberikan kepada murid yang belajar di

MULO Koetaradja dan HIS yang kebanyakannya berasal dari anak *uleebalang* (bangsawan).

Keadaan tersebut berlangsung hingga masuk Jepang ke Aceh. Pada masa pendudukan Jepang, MULO Koetaradja tidak berkembang seperti pada masa penjajahan Belanda, karena Jepang tidak banyak melakukan perhatian bidang pendidikan, tetapi lebih banyak pada pembangunan militer. Sarana dan prasarana pendidikan seperti MULO Koetaradja justru dimanfaatkan oleh Jepang sebagai markas pendidikan militer. Jepang hanya memanfaatkan sarana dan prasarana yang ditinggalkan oleh Belanda bagi kepentingan militernya.

a. Murid dan Guru

Dalam pelaksanaannya, MULO Koetaradja diperuntukkan bagi golongan elit, sehingga dalam merekrut siswa sangat selektif. Murid yang boleh mendaftar di MULO Koetaradja adalah yang sudah lulus *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS) dan *Europeese Lagere School* (ELS). Syarat lain yang diterapkan untuk memasuki sekolah tersebut adalah anak keturunan *uleebalang* dan bangsawan Aceh. Selain itu, siswa yang boleh mendaftar hanya anak laki-laki, sehingga murid sekolah MULO Koetaradja semuanya laki-laki. Hal itu berdampak pada sedikitnya orang tua yang menyekolahkan anaknya untuk belajar di sekolah tersebut. Belum ditemukan data yang lengkap mengenai jumlah murid setiap tahunnya, pada tahun 1935, jumlah siswa yang belajar di MULO hanya 79 orang (Memorie van overgave, assistent resident van Groot-Atjeh, C.E. Maier, 17 Juni 1935).

Pemerintah Hindia Belanda memberikan kesempatan bagi lulusan MULO Koetaradja untuk melanjutkan ke tingkat sekolah selanjutnya, misalnya HBS (*Horege Burger School*), baik yang terdapat di negara jajahan, maupun di negara penjajah. Oleh karena itu, banyak lulusan MULO yang melanjutkan pendidikan hingga mendapatkan gelar sarjana. Di antara alumni MULO yang memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan pada sekolah kedokteran Belanda, yaitu *Nederlandsch-Indische Artsen School* (NIAS) di Surabaya adalah M. Mahyuddin, T. Tajuddin, dan Zainal Abidin. Selanjutnya, alumni MULO Koetaradja yang

berhasil menempuh pendidikan pada *Opleiding voor Inlandsche Ambtenaren* di Batavia (Jakarta), yaitu Teuku Chik Muhammad Daud Syah yang berasal dari Idi, Aceh Timur (Memorie van overgave assistent resident van Groot-Atjeh, C.E. Maier, 17 Juni 1935).

Dalam perkembangan selanjutnya, terutama setelah mendapatkan masukan, kritik, dan saran dari berbagai kalangan, MULO Koetaradja melakukan pembenahan. MULO Koetaradja akhirnya menerima siswa dari berbagai suku bangsa, baik dari kalangan pribumi maupun Eropa. Hal itu terjadi bersamaan dengan terpilihnya J. Jongejans untuk memimpin Aceh (1936--1938). Meskipun demikian, jumlah sekolah MULO di Aceh tetap tidak bertambah bahkan hingga berakhir Pemerintahan Hindia Belanda di Aceh. Namun, minat masyarakat terhadap sekolah tersebut terus meningkat (Jongejans, 1936: 262).

Meningkat jumlah murid di MULO Koetaradja menyebabkan terjadi kekurangan guru. Untuk mengantisipasinya, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah *Normaal Cursus* di Aceh pada tahun 1909. Namun, *Normaal Cursus* baru beroperasi pada 7 Februari 1910 (*Koloniaal Verslag*, 1910: 12). Sekolah tersebut khusus mendidik tenaga pengajar di Aceh. Dengan adanya sekolah kursus tersebut, kekurangan tenaga pengajar dapat diatasi. Tidak hanya dapat diatasi, tetapi jumlah tenaga pengajar bertambah banyak, misalnya, pada tahun 1918 berjumlah 4.190 orang (*Mail Rapporten*, 3225/20: 23).

Tenaga pengajar tersebut kebanyakan berasal dari luar Aceh, seperti Mandailing (Sumatera Utara), Minangkabau (Sumatera Barat), dan sebagian kecil dari orang Aceh sendiri (*Mail Rapporten*, 3225/20: 24). Namun, tenaga pengajar dari luar Aceh pada umumnya tidak dapat berbahasa Aceh, sementara siswanya kurang pandai berbahasa Melayu yang digunakan di sekolah. Situasi tersebut menyebabkan berkurangnya minat siswa untuk bersekolah. Selain itu, muncul pula konflik antara siswa dengan tenaga pengajar bangsa Belanda atau Eropa, sehingga banyak siswa yang dikeluarkan dari MULO. Namun, ada yang menyebutkan bahwa Pemerintah Hindia Belanda sengaja mendatangkan guru dari luar Aceh, karena diyakini loyalitasnya secara penuh kepada mereka (Ismail, 2002: 239).

b. Kurikulum dan Mata Pelajaran

Penerimaan siswa baru di MULO dilakukan bersamaan dengan pelepasan siswa yang sudah selesai masa studi. Tahun ajaran baru dan berakhirnya masa studi biasanya dilaksanakan pada bulan Agustus. Pemerintah Hindia Belanda bermaksud menyesuaikan tahun ajaran tersebut bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun Ratu Wilhelmina, Ratu Belanda yang lahir pada 31 Agustus (Kesuma, 2007: 116). Untuk mengisi raport siswa, guru melakukan penilaian sebanyak tiga kali setiap tahun ajaran.

Pihak sekolah membuat susunan waktu belajar yang bervariasi, misalnya, untuk kelas satu, pelajaran dimulai pada pukul 07.30 - pukul 10.00. Selanjutnya, murid keluar dan pulang ke tempat tinggalnya masing-masing. Siswa kelas tiga memulai belajar pada waktu yang sama dengan anak kelas satu, tetapi pada pukul 10.00 diberikan waktu istirahat selama 15 menit. Selanjutnya, pada pukul 10.15 siswa kelas dua memulai belajar, begitu juga siswa kelas tiga belajar kembali. Siswa kelas dua dan kelas tiga sama-sama pulang sekolah pada pukul 12.30. Hal itu disebabkan pelajaran anak kelas tiga lebih banyak, sehingga terkadang mereka harus pulang hingga pukul 01.00 (Kesuma, 2007: 117). Selain jadwal belajar tersebut, terdapat pula jadwal belajar yang dilaksanakan pukul 08.00 hingga 11.00 atau paling lambat pada pukul 11.30. Adapun setiap Jumat, Ahad, dan hari libur yang ditentukan oleh pemerintah, belajar ditiadakan. Demikian pula pada bulan puasa, kegiatan belajar mengajar sebulan penuh ditiadakan (Mail Rapporten. No. 545/09).

Dalam kurikulum MULO Koetaradja, mata pelajaran umum yang diajarkan hampir sama dengan mata pelajaran yang diajarkan pada MULO di luar Aceh, yaitu penguasaan Bahasa Belanda, Bahasa Perancis, Inggris, Jerman, Ilmu Hitung, Ilmu Pasti, Ilmu Alam, Sejarah, Ilmu Bumi, dan menggambar. Pelajaran tambahan yang diajarkan adalah kepanduan, seperti *Nederlansche Padvinders Vereeniging* (Perhimpunan Kepanduan Hindia Belanda). Namun, dalam kurikulum MULO Koetaradja, selain pelajaran umum dicantumkan pula mata pelajaran agama Islam. Pemerintah Hindia Belanda mengundang ulama Aceh

untuk mengajarkan mata pelajaran agama Islam, di antaranya Teungku Syekh Ibrahim Lambhuk (Ismail, 2002: 444).

Mata pelajaran agama dimaksudkan untuk menarik simpati masyarakat Aceh, karena sebagai masyarakat Muslim, mereka sangat terikat dengan pendidikan agama. Selain itu, dengan adanya pendidikan agama dapat menghilangkan anggapan masyarakat bahwa belajar di sekolah yang didirikan oleh Belanda dapat menjadi kafir. Pada mulanya masyarakat Aceh tidak mau menyekolahkan anaknya ke sekolah yang didirikan oleh Belanda, mereka menganggap melalui sekolah tersebut anak-anak dididik dengan budaya Barat dan nilai-nilai yang bertentangan dengan keyakinan mereka sebagai Muslim. Demikian pula dengan kependuan, siswa yang berasal dari Aceh tidak ada yang mau ikut kegiatan kependuan, mereka menganggap yang diajarkan di kependuan tersebut bertentangan dengan budaya mereka. Keadaan itu menunjukkan bahwa Pemerintah Hindia Belanda gagal meng-Eropa-nisasi rakyat Aceh melalui sistem pendidikan.

Kontribusi MULO bagi Pergerakan Nasional di Aceh

a. Lahir Elit Modern

Munculnya elit modern di Aceh berkaitan erat dengan diterapkannya politik pasifikasi oleh Pemerintah Hindia Belanda. Salah satu isi kebijakan politik pasifikasi adalah perbaikan bidang pendidikan seperti sudah disebutkan sebelumnya. Pada awalnya memang hanya orang-orang tertentu seperti dari kalangan *uleebalang* dan bangsawan yang mendapatkan pendidikan, tetapi dalam perkembangannya masyarakat umum juga dapat bersekolah pada sekolah umum yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Di Aceh penerapan kebijakan pasifikasi merupakan salah satu saran C. Snouck Hurgronje kepada Pemerintah Hindia Belanda (Niel, 1984: 55). Oleh karena itu, elit modern di Aceh muncul dan berkembang setelah mendapatkan pendidikan berpaham Barat yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Mereka yang lulus dari sekolah tersebut berkembang menjadi kelompok intelektual atau modern. Mereka inilah yang nantinya

membuka wawasan dan kesadaran masyarakat Aceh tentang nasionalisme, identitas, dan hak layak untuk hidup bebas.

Pandangan yang dimiliki oleh setiap pemimpin masyarakat menentukan terhadap diterimanya unsur-unsur baru yang berkembang, sehingga mendorong terjadinya perubahan. Para pemimpin masyarakat pada umumnya sudah mulai tidak terikat dengan tradisi dan sudah cenderung memanfaatkan sistem pendidikan Barat. Mereka juga mulai menyadarkan masyarakat untuk menerima sistem pendidikan Barat. Tidak hanya itu, semangat nasionalisme mereka mulai tumbuh, mereka mulai memahami betapa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, karena hanya dengan itu dapat menentang penjajahan dan penindasan (Rambe dkk., 2019: 11).

Putra-putri Aceh yang sudah selesai belajar pada MULO Koetaradja, banyak yang bekerja pada birokrasi Pemerintah Hindia Belanda. Mereka yang berasal dari sekolah yang menggunakan bahasa Belanda, terutama dari keluarga bangsawan mendapatkan kedudukan dan pekerjaan yang istimewa. Jawatan di perguruan milik pemerintah, kepolisian, perusahaan kereta api negara, dan sebagainya mulai memberikan kesempatan bagi orang pribumi. Perkembangan di negara Islam dari Asia Barat, seperti gerakan pembaharuan di Mesir dan Turki berpengaruh pada negeri Islam lainnya, termasuk Indonesia (Kastolani, 2019: viii). Keadaan itu dapat menjadi pertanda dimulainya era pencerahan bagi masyarakat Aceh.

b. Mendirikan Organisasi Pergerakan

Dari orang-orang yang sudah mendapatkan pendidikan Barat, baik dari pendidikan MULO Koetaradja maupun pendidikan keagamaan, muncullah ide-ide baru yang cemerlang mengenai pendidikan. Mereka mulai berpikir bagaimana mengubah adat yang sudah tidak sesuai dengan zaman dan berkeinginan mendirikan wadah perjuangan dengan mendirikan perkumpulan sosial-politik guna melakukan berbagai perbaikan kehidupan masyarakat. Didasarkan pada pengetahuannya ketika menempuh pendidikan, muncul keinginan untuk melakukan perjuangan melalui cara yang terpuji, bukan dengan mengandalkan

kekuatan fisik, tetapi dengan berbagai negosiasi dan diplomasi. Hal itu tidak dapat dilakukan tanpa adanya suatu wadah perjuangan, sehingga masyarakat Aceh yang terdidik dan tercerahkan terutama lulusan MULO Koetaradja mulai terlibat dalam organisasi pergerakan nasional.

Di antara organisasi yang didirikan oleh lulusan MULO Koetaradja dan mereka banyak terlibat di dalamnya adalah organisasi Muhammadiyah, *Jong Islamieten Bond* (JIB), Jamiatul Wasliyah, dan Taman Siswa. Organisasi Muhammadiyah berkembang pesat di daerah Aceh yang diprakarsai oleh S. Djaja Soekarta pada sekitar tahun 1923 (Muhammadiyah Wilayah Daerah Istimewa Aceh, 1962: 60). Akan tetapi, organisasi ini diresmikan pada tahun 1927 yang diketuai oleh R.O. Armadinata. Pada umumnya, masyarakat Aceh menyampaikan hasrat sosial-politiknya menggunakan organisasi tersebut. Berbeda halnya dengan di Jawa, Muhammadiyah Aceh bergerak di bidang sosial keagamaan dan terlibat aktif dalam perpolitikan. Oleh karena itu, Pemerintah Hindia Belanda membatasi perluasan Muhammadiyah di seluruh Aceh (Muhammadiyah Wilayah Daerah Istimewa Aceh, 1962: 60).

Salah satu kontribusi penting Muhammadiyah pada masa itu adalah mengusulkan supaya anggota *Volksraad* harus lebih banyak berasal dari kalangan bumiputra. Usulan itu disampaikan pada rapat yang diadakan pada 27 Maret 1928 di Banda Aceh. Selain itu, juga diusulkan untuk mengutus delegasi ke Belanda (Piekaar, 1949: 17).

Organisasi *Jong Islamieten Bond* (JIB), organisasi dari luar Aceh yang didirikan di Aceh pada tahun 1930 atas inisiatif Aziz Putra dan Brahim yang didukung oleh Teuku Nyak Arif. Di Aceh, organisasi ini bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Pada mulanya JIB berkembang di Banda Aceh, Sigli, dan Lhokseumawe. JIB juga mendirikan cabang wanitanya yang bernama JIBDA (*Jong Islamieten Bond Dames Afdeeling*). Organisasi cabang wanita ini pada tahun 1931 mendirikan sekolah putri, tetapi pada tahun 1932 menjadi sekolah campuran antara perempuan dan laki-laki. Pada 6 Oktober 1932, JIB membuka perwakilan di Sabang dan yang memimpin adalah Abdul Rahim. Namun, JIB yang didirikan di Sabang merupakan yang terakhir, karena setelah itu tidak lagi

membuka perwakilannya di daerah Aceh (Politieke Politoneel Verslag Betreffende het Gewest Atjeh en Onderhoorigheden. No. 130x/29: 91).

Jamiatul Wasliyah sebuah organisasi yang berasal dari Sumatera Utara pernah berdiri di Aceh yang bergerak di bidang keagamaan dan pendidikan. Namun, organisasi ini tidak berkembang luas di Aceh, hanya di daerah Aceh Timur. Di daerah tersebut, Jamiatul Wasliyah membangun beberapa sekolah di Kuala Simpang, Alue Merbau, Langsa, dan Idie. Berbeda dengan Jamiatul Wasliyah, Taman Siswa berkembang pesat di Banda Aceh. Atas inisiatif beberapa orang pemuka masyarakat Aceh, Taman Siswa didirikan di Banda Aceh pada 11 Juni 1932. Majelis Luhur Taman Siswa mengutus 3 orang tenaga pengajarnya ke Aceh, mereka adalah Ki Soewondo Kartoprodjo bersama istrinya dan Soetikno Patmosoemarto. Atas usaha mereka dalam waktu yang tidak begitu lama sudah berdiri beberapa sekolah Taman Siswa di Banda Aceh (Ismail, 2002: 554-562).

Taman Siswa Aceh selalu menunjukkan sikap tidak mau berkompromi dengan Pemerintah Hindia Belanda. Taman Siswa Aceh menunjukkan sikap perlawanan kepada Belanda dengan tidak ikut merayakan hari peringatan ulang tahun Ratu Wilhelmina pada tahun 1933. Akibatnya, Pemerintah Hindia Belanda memboikot sekolah Taman Siswa, putra-putri terntara dan pegawai dilarang bersekolah di Taman Siswa. Sikap perlawanan lain yang ditunjukkan kepada Belanda oleh Taman Siswa adalah dengan merayakan Pahlawan Pangeran Diponegoro. Pihak Belanda sangat marah, sehingga memenjarakan beberapa tokoh Taman Siswa. Taman Siswa Aceh menambahkan mata pelajaran agama kepada siswanya, hal itu dimaksudkan sebagai salah satu pendekatan supaya Taman Siswa dapat diterima baik oleh masyarakat Aceh (Sufi, 2018: 67).

Selain bergerak di bidang organisasi, ada juga di antara lulusan MULO Koetaradja yang memelopori pemajuan seni-budaya, pada tahun 1908 didirikan organisasi musik yang bernama *Atjeh Band*. *Atjeh Band* tampil dalam berbagai kegiatan di Banda Aceh. Organisasi di bidang budaya tersebut ternyata diikuti juga oleh berbagai daerah di Aceh. Mereka mendirikan berbagai organisasi di bidang seni-budaya, seperti Jolly Night Band di Peureulak (Kabupaten Aceh Timur) pada tahun 1930. Grup band ini dimaksudkan untuk menghibur

masyarakat yang dipertunjukkan pada malam hari. Selain itu, terdapat pula grup Tungkep (*Tunel Gezelchap Peureulak*) dan *Liliput Band* di Jeunieb (Kabupaten Bireuen) pada tahun 1937 (Zainuddin, 1965: 126-131).

Selain berjuang melalui organisasi dan kebudayaan, masyarakat Aceh lulusan sekolah MULO Koetaradja juga berjuang melalui birokrasi pemerintah, di antaranya melalui *Volksraad* (Dewan Rakyat). Semenjak dewan itu dibentuk pada 16 Desember 1916, anggota perwakilan dari Aceh adalah Teuku Chiek Muhammad Thayeb pada tahun 1918. Teuku Chiek Muhammad Thayeb memainkan peran penting di dewan rakyat tersebut. Dia kerap kali memberikan usulan yang bernada tegas, sinis, dan selalu menentang Pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, dia diberhentikan pada tahun 1920 sebelum habis masa jabatannya (Sufi, 2018: 58).

Pemerintah Hindia Belanda mengganti Teuku Chiek Muhammad Thayeb dengan Teuku Nyak Arif pada tahun 1927. Ternyata, Teuku Nyak Arif tidak kalah keras dari Teuku Chiek Muhammad Thayeb dalam mengkritik Pemerintah Hindia Belanda. Dalam sebuah pidatonya di Dewan Rakyat, dia mengumandangkan tentang pentingnya kesatuan nasional dan sudah saatnya Indonesia merdeka dan mengusulkan supaya pemerintah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk bersekolah.

Dia juga mengusulkan perlu dilakukan perbaikan terhadap gaji dan kualitas tenaga pengajar dan mengecam terhadap kebijakan ekonomi dan pajak yang menindas rakyat. Teuku Nyak Arif menolak usaha Belanda yang ingin menerapkan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di sekolah, tetapi harus dengan bahasa Melayu dan ikut mendorong terbentuknya Fraksi Nasional di *Volksraad* pada tahun 1930 dengan tujuan mencapai Indonesia merdeka dalam tempo yang singkat. Dia juga mengkritik pemerintah yang terlalu membela kepentingan perkebunan Belanda di Indonesia (Sufi, 2018: 59).

Kehadiran MULO Koetaradja menginspirasi pula masyarakat Aceh untuk mendirikan berbagai sekolah agama di Aceh. Oleh karena itu, semenjak tahun 1930 banyak sekolah agama didirikan di Aceh. Pendirian sekolah agama tersebut dipelopori oleh sebagian masyarakat Aceh, baik lulusan MULO Koetaradja

maupun sekolah Eropa lainnya. Di antara tokoh-tokoh masyarakat Aceh yang terinspirasi dengan kehadiran MULO, sehingga mendirikan berbagai sekolah agama adalah Tuanku Raja Kemala yang mendirikan Madrasah Al-Khairiyah. Teungku Syekh Abd. Hamid Samalanga, Teuku Chiek Peusangan, dan Teungku A. Rahman Meunasah Meucap membangun Al-Muslim Matang Geulumpang Dua. Teuku Sri Maharaja Lhokseumawe, Syekh Al-Kalali, dan Tgk. M. Hasbi ash-Shiddieqi membina Madrasah Al-Irsyad Lhokseumawe. Teuku Chiek Idi dan Sayed Husin Syahabi membangun madrasah Ahlusunnah Waljamaah, kemudian Madrasah Madani di Idi.

Teungku Mohd. Daud Beureu-eh dan Teungku H. Abdullah Ujong Rimba membangun Madrasah Saadah Adabiyah di Sigli (Reid, 1987: 54-58). Madrasah Islam *Dunia Akhirat Middelbare School* (DAMS) didirikan di Sigli pada tahun 1938 atas prakarsa Teuku Pakeh Mahmud dari XII Mukim Pidie dan Teuku Muhammad Amin. Untuk mendidik guru didirikan madrasah di Lampakuk, Aceh Besar, yang bernama *Makhad Imanul Mukhlis* (MIM) atas prakarsa Teuku Panglima Polem Muhammad Daud (Panglima Sagi XXII Mukim) beserta puteranya, Teuku Muhammad Ali pada tahun 1940, dan sebagainya (Sufi, 2018: 73).

Sistem pendidikan madrasah berkembang pesat di Aceh, pada Oktober 1936, madrasah yang terdaftar saja sekitar 94 buah. Hal itu berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Hindia Belanda yang dituangkan dalam Stbl. Tahun 1925, no. 219 yang memberikan izin untuk didirikan madrasah Islam (Sufi, 2018: 72). Selain itu, masyarakat Aceh sangat menyambut kehadiran sistem pendidikan madrasah. Dukungan dari penguasa setempat terhadap sistem pendidikan madrasah merupakan faktor penting bagi kelangsungannya di Aceh. Selain itu, pendirian berbagai madrasah oleh tokoh Aceh itu juga dimaksudkan untuk menghambat laju pertumbuhan sekolah Eropa di Aceh, karena sebagian masyarakat Aceh masih belum menerima kehadiran sekolah tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Hindia Belanda sangat sulit membendung dan mengawasi pendidikan madrasah yang sesungguhnya berbahaya baginya.

Karakteristik pergerakan kebangsaan di Aceh lebih bersifat keagamaan daripada politis, tetapi sangat menggusarkan Pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, mereka mengawasi sangat ketat terhadap tokoh pergerakan di Aceh. Pengawasan itu dilakukan dengan cara membentuk *Veld Politie* (polisi lapangan) yang berskala besar dan dipersenjatai. Tokoh-tokoh pergerakan yang datang dari luar ke Aceh selalu diawasi. Gerakan-gerakan yang bersifat keagamaan dibatasi mendirikan cabangnya di seluruh Aceh, apalagi ada di antara para tokoh keagamaan tersebut yang terang-terangan menggunakan simbol-simbol keagamaan dengan semboyan Islamlah yang menguasai Indonesia, Islam menentang penjajahan, dan dengan non-kooperasi meraih kemerdekaan, hal itu memunculkan bermacam tanggapan dari pihak Belanda (Sufi, 2018: 74).

PENUTUP

Salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk menguasai Aceh adalah dengan melakukan perbaikan kesejahteraan dan pendidikan masyarakat. Perbaikan kesejahteraan dilakukan dengan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana serta bantuan langsung bagi peningkatan usaha masyarakat, terutama di bidang pertanian dan perkebunan. Demikian pula dalam bidang peningkatan kecerdasan masyarakat dilakukan dengan mendirikan berbagai lembaga pendidikan, di antaranya MULO Koetaradja.

Pembangunan sekolah tersebut pada mulanya dimaksudkan untuk kepentingan birokrasi Belanda di Aceh. Namun, dalam perkembangannya, pembangunan sekolah oleh Belanda merupakan strategi penting untuk mengimbangi pendidikan Islam yang telah menjiwai rakyat Aceh. Dengan sistem pendidikan tersebut juga untuk meredam permusuhan rakyat terhadap Belanda. Selain itu, yang lebih penting dengan didirikan MULO Koetaradja adalah untuk menghasilkan pemuda-pemuda Aceh yang berpaham Barat (politik Belanda).

Dalam praktiknya, dalam pendidikan MULO Koetaradja terjadi dualisme sistem sekolah, karena ada sekolah yang diperuntukkan bagi orang Eropa dan rakyat biasa. Kurangnya pengelolaan yang baik dalam sistem sekolah MULO Koetaradja menyebabkan pemerintah mengadakan kurikulum yang selalu

berubah. Selain itu, terjadi pula sistem diskriminasi dalam pendidikan MULO Koetaradja, karena adanya pengelompokan siswa berdasarkan status sosial.

Lulusan pendidikan MULO Koetaradja membawa perubahan dalam masyarakat Aceh, di antaranya lahir golongan yang terdidik dan tercerahkan. Golongan yang tercerahkan itu mendirikan pula berbagai madrasah dan sekolah. Rakyat menerima dengan baik madrasah dan sekolah tersebut sehingga dalam waktu yang tidak begitu lama sudah tersebar ke pelosok Aceh. Penerimaan itu berkaitan erat dengan sistem pendidikan yang mereka tawarkan kepada masyarakat, yaitu pendidikan yang bernuansa Islami.

Melalui lembaga pendidikan yang mereka dirikan, mereka menumbuhkan dan menyebarkan semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme itu mereka wujudkan dalam wadah organisasi. Mereka mendirikan berbagai organisasi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tumbuhnya bermacam organisasi sosial-politik dan sosial-keagamaan selama perjuangan kemerdekaan Indonesia di Aceh, tidak terlepas dari kontribusi MULO Koetaradja.

DAFTAR PUSTAKA

- Algemeen Verslag van het Onderwijs in Nederlandsch-Indie Over 1928.1930.*
Eerste deel: Weltevreden: Landsdrukkerij
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1984. *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Ismail, Badruzzaman (ed.). 2002. *Perkembangan Pendidikan di Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: MPD Nanggroe Aceh Darussalam
- Jongejans, J. *Land en Volk van Atjeh, Vroeger en Nu*, Baarn: Hollandia Drukkerij, 1936
- Kastolani. 2019. *Islam dan Modernitas: Sejarah Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika
- Kesuma, Asli dkk. 2007. *Sejarah Pendidikan Aceh*. Banda Aceh: Dinas Pendidikan Aceh
- Koloniaal Verslag*, 1910

- Kuntowijoyo. 2005. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Pustaka
- Kreemer, J. 1923. *Atjeh*, Leiden: E. J. Brill
- Mail Rapporten* No. 545/09. Kementerian Dalam Negeri Belanda, Den Haag
- Mail Rapporten* No. 130x/29. Kementerian Dalam Negeri Belanda, Den Haag
- Mail Rapporten* No. 3225/20. Kementerian Dalam Negeri Belanda, Den Haag
- Memorie van overgave assistent resident van Groot-Atjeh, C.E. Maier, 17 Juni 1935*
- Memorie van overgave van A.Ph. van Aken, Aftredend Gouverneur van Atjeh en Onderhoorigheden, Pebruari 1936*
- Muhammadiyah Wilayah Daerah Istimewa Aceh. 1962. *Menyambut Konferensi Muhammadiyah Wilayah Daerah Istimewa Aceh ke-26*. Banda Aceh: Muhammadiyah Wilayah Daerah Istimewa Aceh
- Muri, A Yusuf. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana
- Niel, V.R. 1984. *Kemunculan elit Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Piekaar, A.J. 1949. *Atjeh en de Oorlog met Japan*. Den Haag: W. Van Hoeve
- Politieke Politoneel Verslag Betreffende het Gewest Atjeh en Onderhoorigheden*. No. 130x/29
- Pranoto, Suhartono W. 2010. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Pringgondigdo, A.K. 1970. *Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia*. Djakarta: Dian Rakjat
- Rambe, Tappil dkk. 2019. *Sejarah Politik dan Kekuasaan*. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Rifa'i, Muhammad. 2011. *Sejarah Pendidikan Nasional dari Masa Klasik hingga Modern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Reid, Anthony. 1987. *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

- Syahrudin dan Heri Susanto. 2019. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat
- Safwan, Mardanas. 1992. *Pahlawan Nasional Teuku Nyak Arief*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sluijs, Van. "Nota", *Atjeh en onderhoorigheden*, September 1918-Oktober 1920, *Kernpapieren*, 797/156, KIT
- Sufi, Rusdi. 2018. *Gerakan Nasionalisme di Aceh 1900-1942*. Banda Aceh: BPNB Aceh
- Suny, Ismail. 1980. *Bunga Rampai tentang Aceh*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara
- Taniputera, Ivan, 2017. *Ensiklopedi Kerajaan-Kerajaan Nusantara I*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Zainuddin, H.M. 1965. *Bungong Rampo*. Medan: Pustaka Iskandar Muda